

**TESIS**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

***REGULATION OF IMPRISONMENT SANCTIONS AGAINST  
PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN  
ACCORDING TO INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS***



**Oleh:**

**FRISTA ANDHIRA ARIE SENO**

**NIM. 2110622048**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

***REGULATION OF IMPRISONMENT SANCTIONS AGAINST  
PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST  
CHILDREN ACCORDING TO INDONESIAN LAWS AND  
REGULATIONS***



**Oleh:**

**FRISTA ANDHIRA ARIE SENO**

**NIM. 2110622048**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**FRISTA ANDHIRA ARIE SENO**  
**NIM. 2110622048**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

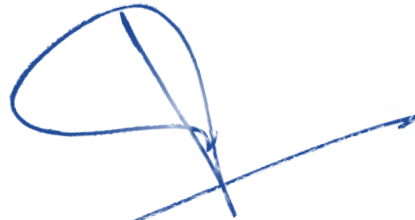
## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:  
**FRISTA ANDHIRA ARIE SENO**  
**NIM. 2110622048**

Disetujui untuk Tahap **UJIAN TESIS**  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:  
**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that extends to the right and then curves upwards at the end.

**Dr. Supardi, S.H., M.H.**  
NIP. 197104281995031001


**TESIS**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh:  
FRISTA ANDHIRA ARIE SENO  
NIM. 2110622048**

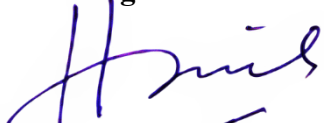
**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 12 Februari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

**Menyetujui:  
Pembimbing**

  
**Dr. Supardi, S.H., M.H.**  
NIP. 197104281995031001

**Koordinator Program Studi**

**Magister Hukum**

  
**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,**  
**M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Dr. Suherman, S.H., LL.M.**  
NIP. 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Frista Andhira Arie Seno  
NIM : 2110622048  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TELRHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Frista Andhira Arie Seno

NIM. 2110622048

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frista Andhira Arie Seno  
NIM : 2110622048  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TELRHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Frista Andhira Arie Seno  
NIM. 2110622048

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Maret 2023 ini adalah Pengaturan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, M.A., Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dr. Henry B. H. Sitorus, S.T., M.T., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Prof. Dr. Prasetyo Hadi, S.E., M.M., CFMP., selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., M.H., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



8. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Ayahanda (alm.) Drs. Nilo Arie Seno, M.H., ibunda Sri Kartini, dan suami Kopol Hendry Ferdinand Kennedy, S.H., S.I.K., M.I.K., serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan do’a.
11. Bapak Dr. H. Supardi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.
12. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji.
13. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku Penguji I.
14. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Akhirnya pada *Allah Subhanahu wa Ta’ala* diserahkan segalanya.

Jakarta, 17 Februari 2024

Penulis,

TTD

Frista Andhira Arie Seno

## ABSTRAK

### PENGATURAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Frista Andhira Arie Seno (2110622048), Supardi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena perlindungan kekerasan seksual masih ambigu dan belum terdapat kesatuan pandangan para penegak hukum sehingga terjadi pertentangan undang-undang karena adanya perbedaan sanksi pidana dalam KUHP, UUPA dan UU TPKS. Persoalan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur di dalam UUPA dan UU TPKS namun dengan ancaman pidana yang berbeda, bahkan juga diatur dalam KUHP di pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak pada tidak adanya rasa takut dan efek jera terhadap pelaku, karena tidak maksimalnya pemidanaan terhadap pelaku. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sedangkan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Selanjutnya data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, namun kedua aturan tersebut memiliki pertentangan dalam hal ketentuan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak; (2) Pengaturan ke depannya agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi dan penguatan terhadap UU TPKS, yaitu terkait dengan pengaturan sanksi batas minimum khusus pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, karena sampai saat ini sanksi pidana penjara yang diatur dalam UU TPKS tidak mengatur batas minimum khusus pidana penjara bagi pelaku.

**Kata Kunci:** pengaturan sanksi pidana, kekerasan seksual, anak.

## **ABSTRACT**

### **REGULATION OF IMPRISONMENT SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN ACCORDING TO INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS**

Frista Andhira Arie Seno (2110622048), Supardi

*This research was conducted to determine the regulation of perpetrators of sexual violence against children according to Indonesian legislation, because the protection of sexual violence is still ambiguous and there is no unity of view of the law enforcement agencies so that there are contradictions in the law due to differences in criminal sanctions in the Criminal Code, UUPA and TPKS Law. Criminal issues against perpetrators of sexual violence against children are regulated in the UUPA and the TPKS Law but with different criminal threats, even also regulated in the Criminal Code in articles governing violations of decency, this indicates that there are still weaknesses in law enforcement against perpetrators of sexual violence against children. Weaknesses in law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children can have an impact on the absence of fear and deterrent effects on the perpetrators, because of the lack of maximum punishment against the perpetrators. This type of research is a normative research method, while the research approach is a statutory approach and a conceptual approach. The nature of this research is descriptive analytical. The data used in this research comes from secondary data. Furthermore, the data that has been successfully collected in the research is analyzed using qualitative analysis. The result of the research shows that: (1) The regulation of perpetrators of sexual violence against children according to Indonesian legislation is regulated in Law Number 35 of 2014, as well as in Law Number 12 of 2022, but the two regulations have contradictions in terms of the provisions of imprisonment sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; (2) Future arrangements so that sexual violence against children does not occur again can be done by revising and strengthening the TPKS Law, namely related to the regulation of a special minimum limit of imprisonment sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children, because until now the imprisonment sanctions provided for in the TPKS Law do not regulate a special minimum limit of imprisonment for perpetrators.*

**Keywords:** *criminal sanctions, sexual violence, children.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan Penelitian .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Orisinalitas Penelitian.....	24
BAB II .....	28
TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Pengertian Umum.....	28
B. Landasan Teori.....	46
BAB III.....	58
METODE PENELITIAN .....	58
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Sifat Penelitian .....	60
D. Analisis Penelitian .....	61
E. Sumber Bahan Hukum .....	61
F. Jadwal Penelitian.....	63
	xi

<b>BAB IV</b> .....	64
<b>PENGATURAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK</b> .....	64
<b>A. Pengaturan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</b> .....	64
<b>B. Pengaturan kedepannya Tidak Terjadi Lagi Kekerasan Seksual terhadap Anak</b> .....	75
<b>BAB V</b> .....	86
<b>PENUTUP</b> .....	86
<b>A. Kesimpulan</b> .....	86
<b>B. Saran</b> .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88